

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan)

ABSTRAK

Wwin Azmi Harahap *

Salah satu tahapan penting pemilu dan pemilihan adalah pencalonan. Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon. Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Parpol. Untuk melakukan unggah tersebut, KPU Kabupaten Asahan menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol.

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut penelitian yuridis empiris yang menelaah peraturan hukum yang diberlakukan dan suatu hal yang dialami di realita masyarakat.. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan kebijakan hukum normatif secara in action dalam setiap fenomena hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan antara lain: Pengaturan hukum system verifikasi administrasi pada system informasi pencalonan pada Pemilu serentak tahun 2024 terdapat dalam Bab V Pasal 42 s/d Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen bakal calon yang dilakukan melalui system informasi pencalonan oleh KPU akan dilakukan analisis dokumen data yang diinput Bacalon di SILON. Pertama adalah melihat ganda identik dan potensi ganda dalam satu bakal calon dan antar bakal calon. Setelah proses analisis selesai, selanjutnya data tersebut akan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap kesungguhan data. Tugas Kabupaten/Kota adalah melakukan verifikasi administrasi kesungguhan data. pnggunaan system teknologi informasi pencalonan terhadap hambatan yang ada pada system pencalonan Pemilu tahun 2024 adalah dengan melakukan optimalisasi Silon pada Pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan dengan: Masa persiapan pengajuan bakal calon, Penggunaan Formulir-Formulir pada Silon, Proses Verifikasi Dilakukan Melalui Silon, Silon Tipe Offline serta Desain Rancangan Aplikasi Silon Pemilu Serentak Tahun 2024 Untuk Tata Kelola Tahapan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan proses pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2024 menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Silon ini bermanfaat untuk mengecek kegandaan, baik di KPU maupun di parpol sendiri. Kegandaan yang bisa saja muncul dari calon yang mencalonkan diri di lebih dari satu daerah, atau malah lebih dari satu parpol..

Keywords: Analisis Hukum, Verifikasi Administrasi, Bakal Calon Anggota DPRD, Sistem Informasi Pencalonan

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE VERIFICATION IMPLEMENTATION OF
DOCUMENT REQUIREMENTS FOR PROSPECTIVE MEMBERS
DISTRICT REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL
ASAHAN ON THE CANDIDATE INFORMATION SYSTEM
SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2024
(Study at Asahan Regency KPU)**

ABSTRACT

Wwin Azmi Harahap *

One of the important stages of elections and elections is nomination. The use of Silon is carried out by uploading the data on the requirements for submitting prospective candidates and the data on the requirements for prospective candidates. The use of Silon is carried out by uploading the data on the requirements for submitting prospective candidates and the data on the requirements for prospective candidates submitted by political parties. To carry out this upload, the KPU of Asahan Regency has prepared accounts for each political party operator.

This research is a type of field research or what is called empirical juridical research which examines the legal regulations in force and things experienced in the reality of society. Empirical juridical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal policies in action in every legal phenomenon in society.

The research results that can be concluded include: Legal arrangements for the administrative verification system in the nomination information system for the 2024 simultaneous elections are contained in Chapter V Article 42 to Article 64 of General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning Nominations of Members of the People's Representative Council, Representative Council Provincial People's Representative Council, and City Regency People's Representative Council. The administrative verification of prospective candidate documents carried out through the KPU's candidacy information system will carry out an analysis of the data documents inputted by Bacalon in SILON. The first is to look at identical doubles and potential doubles within one prospective candidate and between prospective candidates. After the analysis process is complete, the data will then be submitted to the Regency/City KPU to carry out administrative verification of the authenticity of the data. The task of the Regency/City is to carry out administrative verification of the seriousness of the data. The use of the candidacy information technology system to overcome the obstacles that exist in the 2024 election nomination system is by optimizing the Silon in the 2024 simultaneous elections which is carried out by: Preparation period for submitting prospective candidates, Use of Forms in the Silon, Verification Process carried out through the Silon, Type of Silon Offline and Design of the 2024 Simultaneous Election Silon Application for Stage Management. The General Election Commission (KPU) requires the registration process for candidates for members of the DPR, DPD and DPRD in the 2024 elections to use the Nomination Information System (Silon). This silon is useful for checking duplicity, both in the KPU and in the political parties themselves. Duplicity that could arise from candidates running in more than one region, or even more than one political party.

Key Word : Law enforcement, narcotics abuse, human rights

* Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.